

Menuju sistem hukum perburuhan Indonesia yang berkeadilan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439369&lokasi=lokal>

Abstrak

Indonesia belum memiliki sistem hukum perburuhan yang adil. Terjadi dilema kepentingan buruh, pemberi kerja dan Pemerintah. Tulisan ini bertujuan membuktikan bahwa sistem hukum perburuhan belum berjalan. Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan statute approach dan sociolegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, substansi pengaturan hukum di bidang hubungan kerja, khususnya upah minimum, outsourcing dan TKI masih terdapat inkonsistensi. Struktur hukum perburuhan belum berjalan. Kedua, terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Dalam Negeri di bidang perburuhan berkaitan dengan otonomi daerah. Terjadi kekosongan hukum dalam upaya hukum bagi masalah perburuhan kolektif. Ketiga, budaya hukum dalam hubungan industrial yang lebih baik belum berjalan. Sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam menciptakan mekanisme perlindungan buruh yang berpijak pada Konvensi dan Rekomendasi ILO.